

Perkembangan kabupaten kuningan dan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto

Soeharjoto Soekapdjo^{1✉}, Debbie Aryani Tribudhi², Heru Absoro³

^{1,2}Universitas Trisakti, Jakarta.

³Komisaris PT. Ganesha Tujuh Empat.

Abstrak

Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis perkembangan Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan timeseries yang berasal dari Badan Pusat Statistik pada 2017-2021. Metode penelitian secara kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif yang menggunakan model analisis Triangulasi. Adapun hasilnya, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan rata-rata lebih besar dari pada Provinsi Jawa Barat, tetapi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan pendapatan per kapita rata-ratanya lebih kecil dari pada Provinsi Jawa Barat. Rata-rata pertumbuhan kontribusi Kabupaten Kuningan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan kontribusi dari masing-masing sektornya terdapat 1 sektor berkontribusi lebih dari 10 persen, 7 sektor berkontribusi 5-10 persen, 8 sektor berkontribusi 0-5 persen, dan 1 sektor pertumbuhannya negatif. Dalam upaya meningkatkan Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten Kuningan, dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pariwisata, karena sektor ini berkorelasi positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk merealisasikannya, perlu mendapat dukungan dari pemerintah serta lembaga keuangan bank dan non bank.

Kata kunci: PDRB; perkembangan; kontribusi; umkm; desentralisasi

The development of kuningan regency and its contribution to gross regional domestic

Abstract

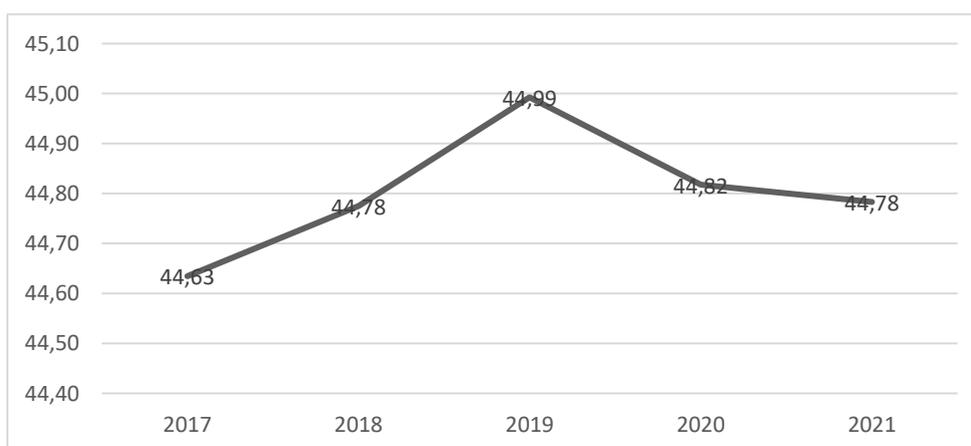
Aim of this study is to analyze the development of Kuningan Regency and its contribution to gross regional domestic product in West Java Province. Timeseries data was used, comes from the Central Statistics Agency in 2017-2021. Quantitative research method used with a descriptive statistical approach with Triangulation analysis model. Result shown, that Gross Regional Domestic Product of Kuningan Regency growth is on average greater than that of West Java Province, but Human Development Index growth, population growth rate, and average per capita income are smaller than those of West Java Province. Growth average in Kuningan Regency's contribute 4.87 percent to the Gross Regional Domestic Product of West Java Province. The contribution growth from each sector is 1 sector contributing more than 10 percent, 7 sectors contributing 5-10 percent, 8 sectors contributing 0-5 percent, and 1 sector growth is negative. In order to improve Gross Regional Domestic Product of Kuningan Regency, the way is by developing the tourism sector, because this sector is positively correlated with Micro, Small and Medium Enterprises development. To realize it, it is necessary to have the support of the government as well as bank and non-bank financial institutions.

Key words: GRDP Development; contribution; msme; decentralization

PENDAHULUAN

Era Reformasi di Indonesia membawa perubahan besar terhadap kebijakan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Soeharjoto, Tribudhi, Hariyanti, Rustam, & Syofyan, 2020). Adapun tujuannya, untuk mempercepat pembangunan daerah. Diterapkannya kebijakan tersebut karena daerah dianggap lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Habibi, 2015). Namun, konsekuensi dari pembangunan yang dilaksanakan secara bottom up, dapat mengakibatkan perkembangan suatu daerah, bergantung pada sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya (Faisal, 2016). Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan harus menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan sifat dan karekteristik dari daerah setempat (Syahza, 2007). Kebijakan tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dan lembaga penunjang di daerah setempat (Gai, Witjaksono, & Maulida, 2020).

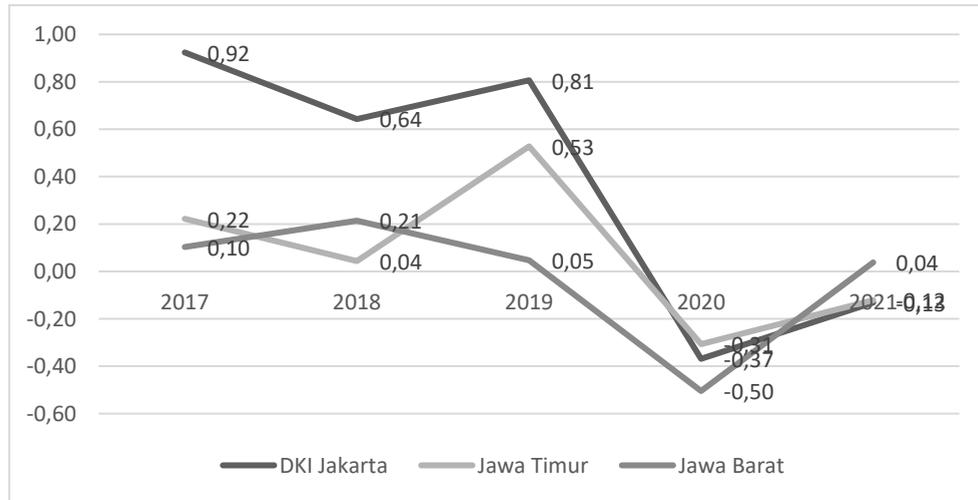
Pelaksanaan otonomi daerah yang baik, dapat mempercepat pembangunan di daerah (Fauzi, 2019). Namun, adanya perbedaan kemampuan antar daerah, mengakibatkan perkembangan di setiap daerahnya menjadi berbeda (Huda & Santoso, 2014). Kondisi ini, mengakibatkan Produk Domestik Regional Bruto antar Provinsi beragam. Pada 2017-2021, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat berkontribusi sebesar 44,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia (Gambar 1). Rata-rata Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebanyak 16,50 persen, Jawa Timur sebanyak 14,86 persen, dan Jawa Barat sebanyak 13,44 Persen.



Gambar 1.

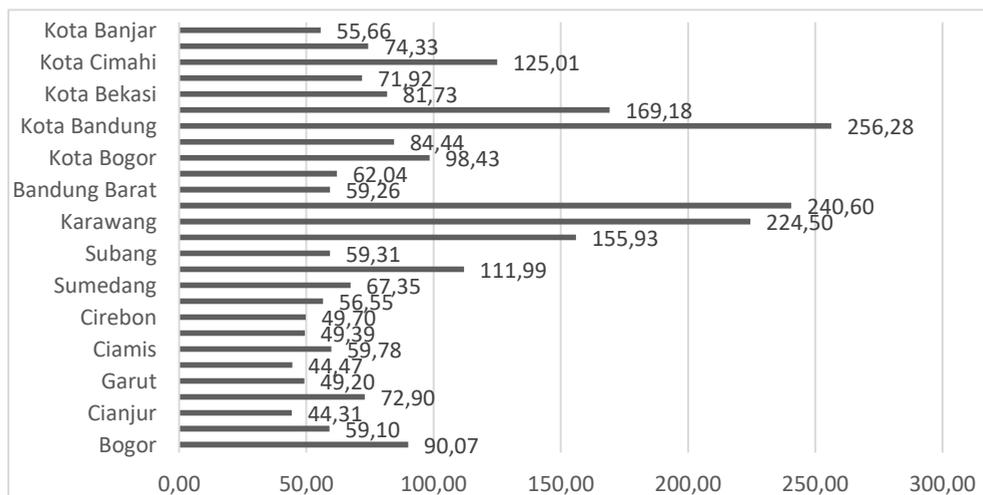
Kontribusi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat Terhadap PDB di Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 2010 Pada 2017-2021 (Persen)

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang unik di Indonesia. Hal ini, dikarenakan pada 2017-2021 rata-rata pertumbuhan kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia memiliki standar deviasi yang rendah sebesar 0,28 persen, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Timur masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,32 persen. Uniknya, pada waktu marak terjadinya pandemi COVID-19 di 2020, pertumbuhan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto nasional turun menjadi yang terendah sebesar -0,50 persen, tetapi pertumbuhan kontribusinya pada 2021 menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur (Gambar 2). Kondisi ini, menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang baik, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budayanya. Untuk itu, Provinsi Jawa Barat dapat dikembangkan sebagai penunjang perekonomian nasional, disamping Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.



Gambar 2.
Pertumbuhan Kontribusi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat Terhadap PDB di Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 2010 Pada 2017-2021 (Persen)

Pada 2017-2021, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten dan kota yang beragam. Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, dan Kabupaten Indramayu merupakan 7 dari 27 wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto per kapita lebih tinggi dari pada Produk Domestik Regional Bruto per kapita Provinsi Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita terendah di Provinsi Jawa barat (Gambar 3).

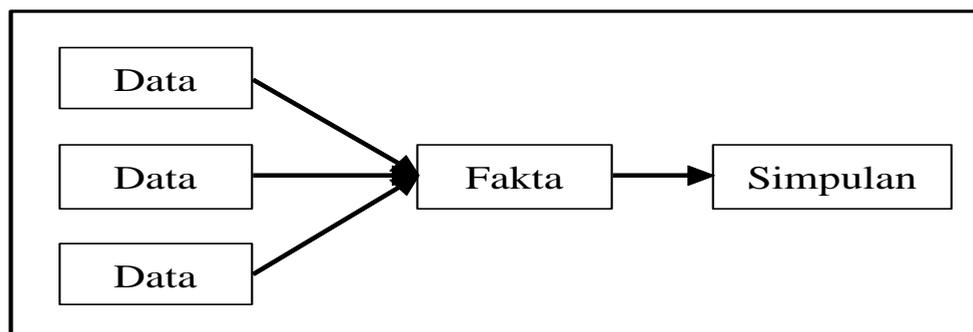


Gambar 3.
Nilai PDRB Kabupaten dan Kota terhadap PDRB di Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan 2010 Pada 2017-2021 (Persen)

Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Kuningan merupakan Kabupaten yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto terendah di Provinsi Jawa Barat. Namun, walaupun Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto yang terendah ke tiga, tetapi memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Hal ini, tidak terlepas dari potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya, serta terdapat ikatan sejarah dunia terkait pelaksanaan perjanjian lingkar Jati di Kabupaten ini, sehingga daerah ini perlu diteliti, agar potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan menuju pentas global. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian perkembangan Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat.

METODE

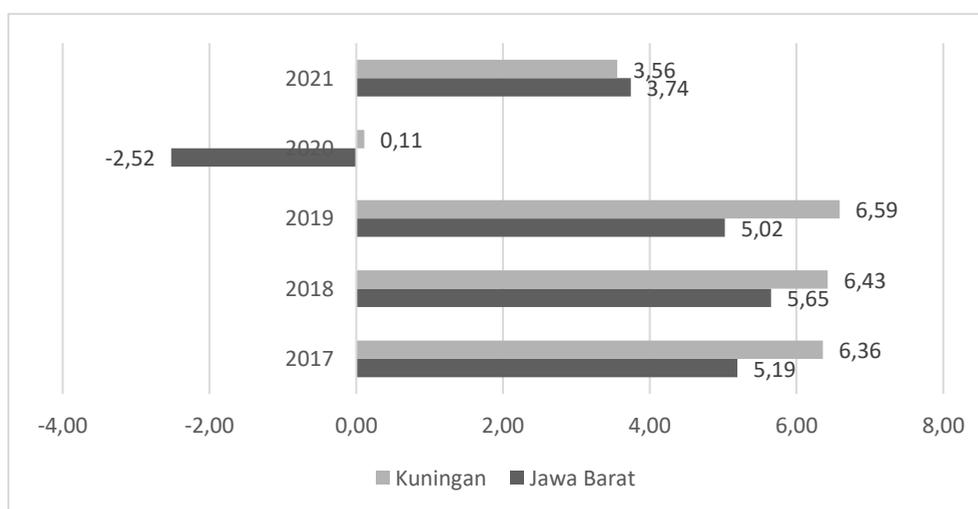
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat. Datanya menggunakan data sekunder, dalam bentuk timeseries pada 2017-2021, yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Metode penelitian secara kuantitatif, dengan pendekatan statistik deskriptif, yang menggunakan model analisis Triangulasi. Adapun prosedurnya, peneliti menggabungkan data yang sejenis, kemudian membuat simpulan, dan hasilnya dibuat narasi, sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahami setiap tujuan yang telah ditetapkan penulis (Rahardjo, 2010). Untuk itu, penelitian ini melalui proses seperti pada gambar 4.



Gambar 4.
Proses Model Analisis Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

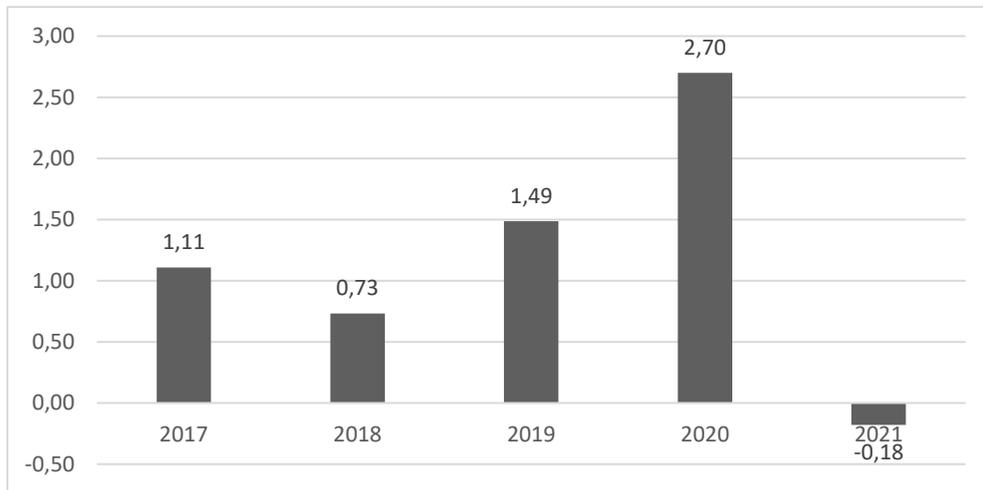
Pada 2017-2021, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan lebih besar dari pada Provinsi Jawa Barat. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,61 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 3,41 persen. Hal ini, diakibatkan merebaknya pandemi COVID-19, sehingga terjadi penurunan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan dari sebesar 6,59 persen pada 2019, menjadi sebesar 0,11 persen pada 2020, sedangkan Provinsi Jawa Barat dari sebesar 5,02 persen pada 2019 menjadi sebesar -2,52 persen pada 2020 (Gambar 5).



Gambar 5.
Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan 2010 Pada 2017-2021 (Persen)

Pertumbuhan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan terhadap Provinsi Jawa barat pada 2017-2021 rata-rata sebesar 1,17 persen. Pertumbuhan kontribusinya memiliki tren yang semakin meningkat, kecuali pada 2018 mengalami penurunan, tetapi pada 2020 kembali meningkat, tetapi pada 2021 dengan merebaknya pandemi COVID-19, mengakibatkan kontribusinya menurun hingga menjadi negatif (Gambar 6). Adapun rasio kontribusi dari Kabupaten Kuningan terhadap

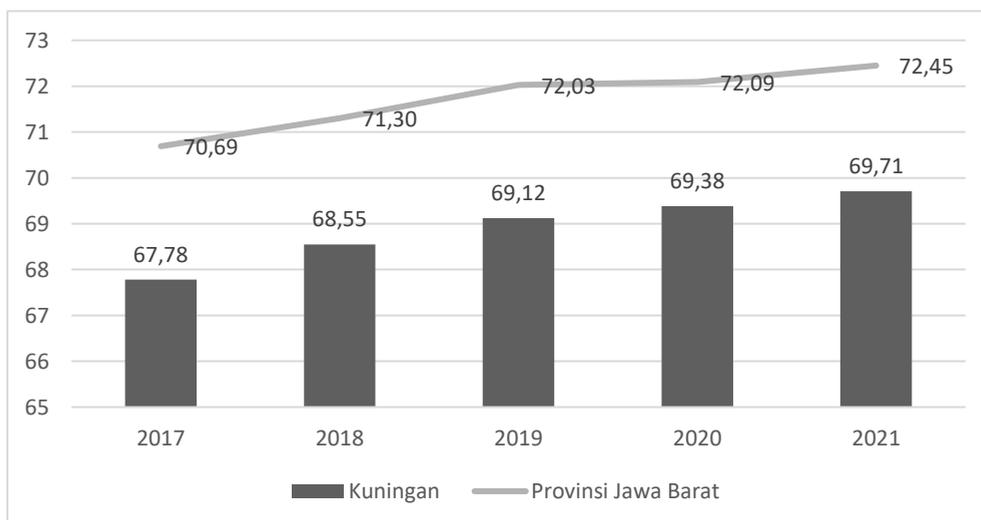
Provinsi Jawa barat pada 2017-2021, rata-rata sebesar 1,13 persen, dengan standar deviasi sebesar 0,0253 persen. Rasio terendah terjadi pada 2017 sebesar 1,1064 persen dan tertinggi pada 2020 sebesar 1,1616 persen. Pada 2018 ke 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dari 1,1145 persen menjadi 1,1311 persen, tetapi pada 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 1,1595 persen.



Gambar 6.

Pertumbuhan Kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan 2010 Pada 2017-2021 (Persen).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat banyak ditunjang oleh sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang dimilikinya, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan penduduknya. Hal ini, penting diamati karena daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan mempercepat terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian Mulyasari (2016), juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pada 2017-2021, rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat sebesar 0,68 persen, sedangkan Kabupaten Kuningan sebesar 0,64 persen (Gambar 7).

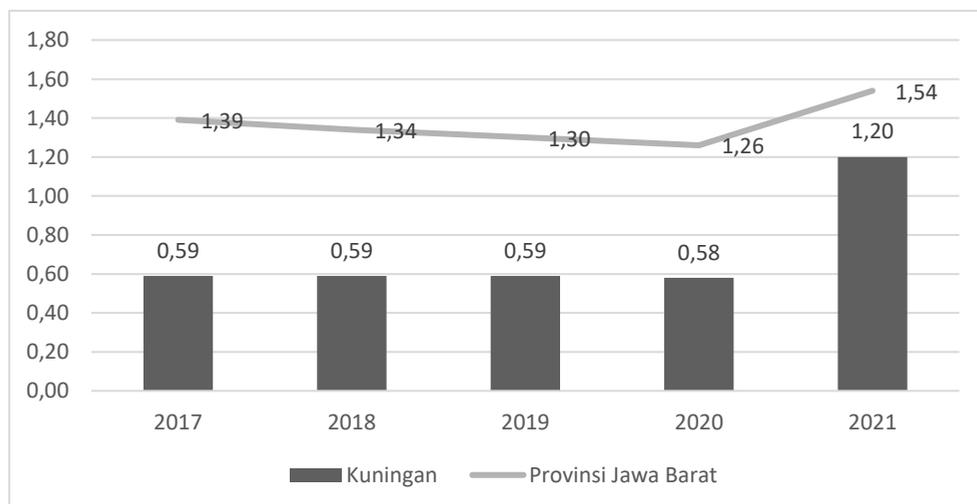


Gambar 7.

IPM Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Pada 2017-2021.

Pada 2017-2021, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuningan masih lebih rendah dari pada Provinsi Jawa Barat. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1,37 persen, sedangkan Kabupaten Kuningan sebesar 0,71 persen (Gambar 8). Untuk itu, Kabupaten

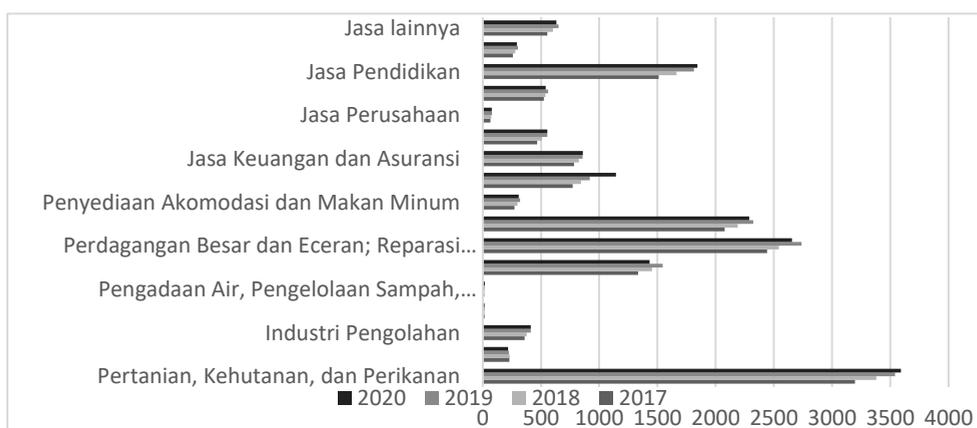
Kuningan masih memiliki peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan penduduknya, dengan asumsi Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat, sehingga peningkatan laju pertumbuhan penduduknya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Agustiana (2015), bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.



Gambar 8.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Pada 2017-2021 (Persen).

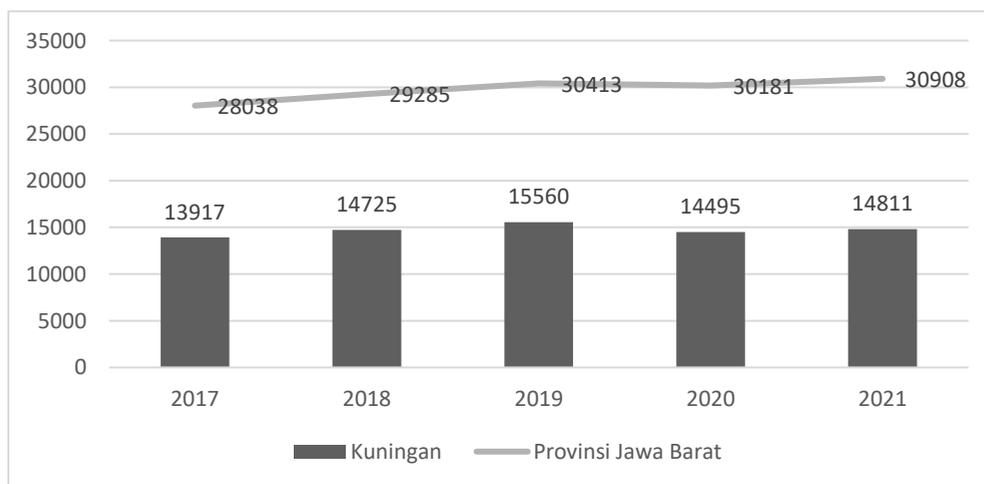
Rata-rata pertumbuhan kontribusi per sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan pada 2017-2020 sebesar 4,87 persen, dengan komposisi yang beragam (Gambar 9). Adapun rata-rata pertumbuhan kontribusi dari masing-masing, pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,36 persen, jasa pendidikan sebesar 7,89 persen, real estate sebesar 6,87 persen, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,68 persen. Jasa perusahaan sebesar 6,22 persen, jasa lainnya sebesar 5,98 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,85 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,36 persen, industri pengolahan sebesar 4,95 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,34 persen. Konstruksi sebesar 4,18 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 3,80 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,61 persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,14 persen. Pengadaan listrik dan gas sebesar 2,53 persen, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1,26 persen. Namun, pertambangan dan penggalian masih sebesar -1,14 persen. Sektor-sektor yang berkembang tersebut, sangat menunjang perkembangan pariwisata di Kabupaten kuningan, sehingga pemerintah tinggal meningkatkan fasilitas pendukungnya berupa infrastruktur dan suprastrukturnya.



Gambar 9.

Nilai Rata-Rata Kontribusi Dari Masing-Masing Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Kuningan Berdasarkan Harga Konstan 2010, Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kuningan Pada 2017-2020 (Rp. Miliar).

Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan perkembangan sektor ekonomi di Kabupaten Kuningan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya. Adanya pandemi COVID-19, berdampak pada terjadinya penurunan terhadap pendapatan per kapita pada 2020, tetapi pada 2021 mengalami peningkatan kembali. Pada 2017-2021, rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar 2,49 persen, sedangkan Kabupaten Kuningan sebesar 1,70 persen, sehingga pendapatan per kapita Kabupaten Kuningan masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (Gambar 10). Untuk itu, Kabupaten Kuningan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapitanya dengan cara mengembangkan sektor pariwisata. Kesemuanya ini, tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya, serta status yang melekat secara historis dan mendunia sebagai lokasi perjanjian lingkar Jati, sehingga dapat dijadikan sebagai icon dari wilayah ini.



Gambar 10.

PDRB Per Kapita di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Pada 2017-2021 (Rp. Ribu)

Pembangunan ekonomi regional merupakan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan tertentu yang berdimensi wilayah (Ridwan, 2016). Hal ini, dipertegas dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengungkapkan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Pada era otonomi daerah, aktivitas pembangunan ekonomi di Indonesia dilandasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Teori lokasi merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, guna menunjang pembangunan yang berbasis wilayah (Purbalangi & Brotosunaryo, 2014). Dalam ruang terdapat banyak lokasi yang dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi (Eko & Rahayu, 2012). Namun, antara lokasi kegiatan ekonomi terdapat jarak, sehingga untuk menghubunginya diperlukan biaya transportasi. Losch (1954), mengembangkan teori lokasi dari segi permintaan dengan memperhitungkan harga produk berdasarkan biaya produksinya. Dalam teorinya, terungkap bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Untuk itu, Losch menyarankan agar lokasi produksi berada di dekat pasar. Pada teori ini, juga ditemukan bahwa wilayah pasar dapat berubah ketika terjadi perubahan harga akibat inflasi. Hal ini, akan mendorong daerah lain untuk melakukan produksi, guna memenuhi permintaan pasar yang belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan batas daerah antar pasar saling berkesinambungan dan terkait. Kondisi ini, terjadi pada Kabupaten Kuningan terhadap Provinsi Jawa Barat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pariwisata akibat merebaknya pandemi COVID-19. Pasca pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semakin meningkatkan permintaan terhadap wisata alam. Kesesuaian dan kuantitas sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kuningan, secara signifikan dapat meningkatkan permintaan pariwisata, sehingga Kabupaten Kuningan dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di wilayah sekitar dan Provinsi Jawa Barat.

Pariwisata dapat dijadikan sebagai primadona untuk menunjang Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kuningan. Hal ini, sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Adhikrisna (2016), bahwa pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut (Utama & Junaedi, 2015). Hasil dari studi Adhikrisna (2016), terungkap bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kuningan, merupakan sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Untuk itu, perlu dilakukan langkah kongkrit, guna mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, dengan cara tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Kesemuanya ini, sudah diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan.

Pertumbuhan kunjungan ke obyek wisata di Kabupaten kuningan pada 2018 sebesar 70,56 persen, kemudian dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada 2019, mengakibatkan terjadi penurunan menjadi sebesar 5,96 persen. Namun, pasca diperlonggarkannya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 2021, kunjungan ke Obyek wisata di Kabupaten Kuningan meningkat secara signifikan, hingga mencapai 517,32 persen. Provinsi Jawa Barat pada 2018 sebesar -54,18 persen, kemudian pada 2019 meningkat menjadi sebesar 128,22 persen, sedangkan pada 2021 turun kembali menjadi sebesar -39,62 persen. Fenomena tersebut, mengakibatkan rata-rata pertumbuhan kunjungan ke obyek wisata pada 2017-2021 di Kabupaten Kuningan menjadi sebesar 197,04 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 11,47 persen. Hal ini, menunjukkan pertumbuhan pariwisata Kabupaten Kuningan menjadi lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Barat. Namun, di Kabupaten Kuningan kondisinya tidak di dukung sepenuhnya dengan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil, karena pertumbuhannya hanya sebesar 2,49 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,42 persen. Padahal berkembangnya kunjungan ke obyek wisata di Kabupaten Kuningan, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun starteginya, usaha ini perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah, lembaga keuangan bank dan non bank. Kesemuanya ini, perlu dilakukan karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan, sehingga ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kuningan, secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakatnya dan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat.

SIMPULAN

Penelitian perkembangan Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat dilakukan pada 2017-2021. Metodenya, kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif dan memakai model analisis triangulasi. Adapun hasilnya, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan lebih besar dari pada Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kuningan dan Jawa Barat banyak ditunjang oleh sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan. Rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan sebesar 4,87 persen, dengan komposisi yang beragam. Kontribusi terbesar dari sektor informasi dan komunikasi yang berada diatas 10 persen, sedangkan jasa pendidikan, real estate, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa perusahaan, jasa lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum berada 5-10 persen. Industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masih berada 0-5 persen. Namun, Pertambangan dan Penggalian sebesar -1,14 persen.

Penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan dapat dioptimalkan guna menunjang peningkatan Produk Domestik Regional Brutonya. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang yang berpotensi untuk dapat dikembangkan. Hal ini, secara signifikan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, karena berkembang sektor tersebut akan berkorelasi positif terhadap meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, untuk itu perlu adanya

dukungan dari pemerintah serta lembaga keuangan bank dan non bank. Namun, pada penelitian selanjutnya perlu diteliti secara mendalam mengenai potensi dari masing-masing sektor ekonomi di kabupaten kuningan, serta keberadaan lembaga penunjang dari kegiatan ekonomi dan mengetahui karakteristik dari masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikrisna, Y. B. (2016). Analisis Pengaruh Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 59-70.
- Agustiana, Z. (2015). Konsumsi Energi, Jumlah Penduduk Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 460-469.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 330-340.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Faisal. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206-215.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 117-124.
- Huda, M., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *Jurnal Teknik POMITS*, 3(2), 81-86.
- Losch, A. (1954). *Economic of Location*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyasari, A. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 368-376.
- Purbalangi, G. A., & Brotosunaryo. (2014). Pengaruh Harga Lahan Terhadap Intensitas Pemanfaatan Lahan di koridor Jalan MGR. Sugiopranoto-Siliwangi Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 3(1), 134-144.
- Ridwan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Pustaka Puitika.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Rustam, R., & Syofyan, S. (2020). Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(4), 1053-1059.
- Syahza, A. (2007). Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 297-310.